

LONJAKAN INFLASI TAHUN 2022 DAN UPAYA MENGATASINYA

13

Nidya Waras Sayekti

Abstrak

Saat ini, inflasi menjadi salah satu kekhawatiran utama negara-negara di dunia. Inflasi berisiko menghambat laju pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Kenaikan harga pangan dan energi di pasar global memicu terjadinya lonjakan inflasi. Tulisan ini bertujuan menganalisis perkiraan lonjakan inflasi yang akan terjadi di berbagai negara dan kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasinya. Indonesia diperkirakan akan mengalami inflasi tertinggi dibandingkan dengan Filipina, India, dan Thailand. Berbagai upaya dapat dilakukan pemerintah Indonesia antara lain: menahan kenaikan harga pangan dan energi melalui windfall tax untuk menanggung beban fiskal APBN akibat subsidi yang dikeluarkan, meningkatkan produksi untuk pasokan, mendorong konversi energi ramah lingkungan, memastikan perluasan insentif harga gas khusus untuk industri prioritas, serta meningkatkan pengawasan distribusi komoditas pangan dan energi agar tepat sasaran. DPR RI melalui komisi terkait perlu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah untuk menekan lonjakan inflasi sehingga daya beli masyarakat dan pemulihan roda ekonomi pasca-pandemi dapat terus meningkat.

Pendahuluan

Inflasi atau kenaikan harga-harga menjadi salah satu kekhawatiran utama negara-negara di dunia saat ini. Isu ini menjadi agenda pembahasan dalam pertemuan kedua tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (*Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG*) G20 yang digelar di Amerika Serikat pekan ini (Bisnis Indonesia, 19 April 2022). Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada

umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum (Badan Pusat Statistik, 2022).

Inflasi menjadi akar dari dinamika ekonomi yang berisiko menghambat laju pemulihan ekonomi



akibat dampak pandemi Covid-19. Selain pandemi Covid-19, invasi Rusia ke Ukraina turut membuat harga-harga pangan dan energi dunia melonjak. Negara-negara pengimpor tidak kuasa menahan kenaikan harga komoditas tersebut. Lonjakan harga memicu inflasi di banyak negara (Bisnis Indonesia, 19 April 2022).

Inflasi di Indonesia pada triwulan I 2022 telah mencapai 1,2% (*year to date*) sepanjang tiga bulan terakhir. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada 2021, maka jumlah tersebut sudah tiga kali lipat lebih tinggi (Media Indonesia, 20 April 2022). Pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamina. Kini, pemerintah juga berencana menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Solar, *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), dan tarif dasar listrik (TDL) dalam waktu dekat (Bisnis Indonesia, 19 April 2022). Kebijakan pemerintah tersebut dapat mendorong terjadinya kenaikan inflasi di tahun 2022 ini.

Pemerintah sebenarnya telah berupaya untuk mengurangi dampak dari kenaikan harga komoditas global tersebut dengan menjaga keseimbangan antara harga konsumsi energi dan kekuatan anggaran negara. Subsidi kepada PT Pertamina dan PT PLN tetap dilakukan seraya menyalurkan dana bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat kelas bawah. Tentu saja hal ini akan memengaruhi defisit anggaran negara. Sedangkan pemerintah Inggris, Korea Selatan, dan Jerman menerapkan kebijakan pemotongan pajak atau subsidi harga bahan bakar dalam upaya mengurangi beban kenaikan harga energi yang memengaruhi standar biaya hidup masyarakatnya (Bisnis Indonesia, 19 April 2022). Berdasarkan uraian

di atas, tulisan ini bertujuan menganalisis perkiraan lonjakan inflasi yang akan terjadi di berbagai negara dan kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasinya.

Inflasi di Berbagai Negara

Pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19 mendapatkan tantangan dari inflasi di berbagai negara. Inflasi di berbagai negara melaju sehingga memantik potensi perlambatan ekonomi sebagai imbas kombinasi pemulihan ekonomi, pengetatan moneter, dan perang Rusia-Ukraina. *Bloomberg* mencatat Amerika Serikat dan Inggris telah masuk dalam gelombang inflasi tertinggi sejak 1980-an. Sementara itu, Sri Lanka dan Pakistan jatuh ke dalam krisis setelah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memperingatkan badai besar pada negara berkembang karena kenaikan harga komoditas. IMF mengatakan bahwa perang Rusia-Ukraina akan memangkas proyeksi perekonomian 143 negara pada tahun ini atau sebesar 86% pertumbuhan ekonomi global. Analisis *Bloomberg Economic*, Tom Orlik, mengatakan kombinasi dampak perang dan Covid-19 akan berujung pada pertumbuhan ekonomi yang melandai. Kondisi ekonomi juga memengaruhi potret di pasar keuangan. Investor dibayangi ketidakpastian apakah inflasi yang tinggi ini telah mencapai puncaknya. Tekanan harga yang berasal dari gangguan rantai pasokan akibat *lockdown* di China serta gangguan komoditas akibat perang Rusia-Ukraina menjadi dua penyebab ketidakpastian ekonomi global (Bisnis Indonesia, 20 April 2022).

Penguncian wilayah (*lockdown*) di China, serta dampak perang

Rusia-Ukraina yang tak kunjung tuntas menjadi pukulan ganda bagi rantai pasok global dan memudahkan optimisme pemulihan ekonomi dunia pada tahun ini. China merupakan salah satu negara dengan pasar terbesar di dunia dan pusat pelabuhan internasional. China juga berperan sebagai salah satu sentra manufaktur global. Sementara itu, perang berkepanjangan Rusia-Ukraina mengakibatkan naiknya harga komoditas terutama pangan dan energi. Rusia dan Ukraina merupakan produsen terbesar gandum, oil, metal nikel, batubara, serta bahan baku fertiliser (Bisnis Indonesia, 20 April 2022).

Menurut Anggota Senior untuk ekonomi internasional di Peterson Institute, Karen Dynan, negara ekonomi maju hanya akan tumbuh moderat pada tahun ini dan melemah pada 2023. Adapun negara berkembang yang lebih maju akan mengalami perubahan seperti India akan meningkat, tetapi China mulai terguncang akibat *lockdown* dan penurunan sektor *property* (Bisnis Indonesia, 19 April 2022).

Dalam Tabel 1, Indonesia diperkirakan akan mengalami kenaikan inflasi sebesar 23,79%, lebih tinggi dibandingkan Filipina, India, dan Thailand. Perkiraan kenaikan inflasi ini dilihat dari *consumer price index* atau indeks harga konsumen (IHK). IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa (Badan Pusat Statistik, diunduh pada 20 April 2022). Sedangkan dari sisi produsen, China diperkirakan mengalami kenaikan inflasi lebih tinggi dibandingkan Jepang. Perkiraan kenaikan inflasi China dan Jepang diukur dari *producer price index* atau indeks harga produsen (IHP) yang menggambarkan tingkat perubahan harga di produsen.

Menyikapi kondisi tersebut, kemungkinan pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah daripada yang diperkirakan. Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga energi dan komoditas membutuhkan kebijakan *exit strategy* bagi negara-negara di

Tabel 1. Perbandingan Harga Barang Kebutuhan Pokok Nasional

Negara	Sebelum	Perkiraan	%
CPI Indonesia	2,06	2,55	23,79
CPI Filipina	3	3,7	23,33
CPI Thailand	5,28	5,55	5,11
CPI India	6,07	6,4	5,43
PPI China	8,8	8,1	-7,95
PPI Jepang	9,7	9,2	-5,154

Sumber: Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok, Kementerian Perdagangan.

Keterangan: Angka perkiraan adalah median dari survei Bloomberg menjelang publikasi data.

PPI= Producer Price Index.

CPI= Consumer Price Index

dunia untuk menghadapinya. Untuk itu, dalam pertemuan FMCBG G20 diharapkan akan menghasilkan kesepahaman mengenai bagaimana *outlook* perekonomian global yang tergantung pada asumsi bagaimana tekanan geopolitik berlangsung (Media Indonesia, 16 April 2022).

Kebijakan Pemerintah Mengendalikan Inflasi

Pemerintah telah menargetkan inflasi tahun 2022 sebesar 3,0% dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022. Dengan angka itu, pertumbuhan ekonomi (Pendapatan Domestik Bruto/PDB) direncanakan sebesar 5,2%. Jika inflasi di atas 3%, maka sedikit banyak berdampak pada pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun 2022.

Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mengingatkan adanya potensi peningkatan inflasi yang signifikan dalam beberapa bulan ke depan. Peningkatan inflasi berpotensi lebih tinggi karena mulai triwulan II 2022 pemerintah telah menetapkan tarif baru Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, harga BBM jenis pertamax juga telah disesuaikan menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Potensi meningkatnya inflasi juga ditengarai wacana pengambil kebijakan yang ingin menaikkan harga-harga sejumlah barang lain, seperti BBM jenis pertalite, solar, listrik, dan LPG.

Rencana tersebut menuai berbagai tanggapan, antara lain pandangan wajar dilakukan penaikan harga barang energi dikarenakan harga keekonomian BBM mengikuti harga minyak dunia yang telah jauh lebih tinggi dari pada harga jual kepada masyarakat.

Jika tidak dilakukan penyesuaian harga, APBN untuk subsidi akan membengkak. Tanggapan lainnya, pemerintah dianggap tidak peka karena masyarakat masih merasakan kenaikan harga sejumlah komoditas lain, seperti minyak goreng dan bahan pokok lainnya. Selain itu, Masyarakat baru mulai menggerakkan kembali roda perekonomian setelah hampir 2 tahun dilanda pandemi Covid-19 (Bisnis Indonesia, 19 April 2022).

Ada empat skenario tingkat inflasi domestik pada 2022 yang dihitung oleh CORE Indonesia. *Pertama*, inflasi diperkirakan berada pada level 2,5% tanpa adanya kebijakan-kebijakan terkait dengan harga. *Kedua*, inflasi diperkirakan mencapai 3,5% dengan penerapan tarif PPN 11% dan harga BBM jenis pertamax yang telah disesuaikan. *Ketiga*, inflasi diperkirakan akan menyentuh 5% bila hitungan skenario kedua diikuti dengan kenaikan harga BBM jenis pertalite menjadi Rp9.000,00 per liternya. *Keempat*, inflasi diperkirakan akan melampaui 5,5% apabila hitungan skenario ketiga diikuti dengan kenaikan harga LPG 3kg yang diasumsikan menjadi Rp20.000,00 per tabungnya (Media Indonesia, 20 April 2022).

Di sisi lain, Indonesia adalah negara net importir minyak dan gas (migas). Rantai suplai domestik migas Indonesia, ditopang oleh impor. Defisit transaksi berjalan (*current account deficit/CAD*) dalam neraca pembayaran internasional Bank Indonesia seringkali disumbang oleh impor migas. Selain itu, melesatnya harga minyak mentah acuan pasar (*crude oil price*) akan berdampak pada harga minyak mentah acuan Indonesia (*Indonesian crude price/ICP*). Hal ini tentunya memberatkan APBN. Dalam asumsi APBN 2022, harga ICP sebesar

USD63 per barel, sementara harga *crude oil* di pasar sudah mencapai USD100 per barel. Gap harga aktual antara minyak mentah dunia dan ICP adalah faktor riil yang menggerus likuiditas pemerintah (Bisnis Indonesia, 19 April 2022).

Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah masih memiliki beberapa opsi untuk menjaga keseimbangan anggaran dan tekanan inflasi. Beberapa program pemerintah seperti kebijakan konversi listrik dan bahan bakar perlu terus dipacu dan dimaksimalkan. Pemerintah juga bisa menerapkan strategi mekanisme subsidi silang hasil penerimaan negara dari ekspor minerba, perkebunan, dan PPN (*windfall tax*) untuk disalurkan kepada PT Pertamina dan PT PLN. Pengawasan pendistribusian LPG 3 kg juga perlu dilakukan agar tepat sasaran. Namun, yang terpenting pemerintah harus tetap fokus untuk memastikan pasokan BBM dan gas agar tidak terjadi kelangkaan. Isu kelangkaan akan sangat mudah memicu inflasi yang lebih besar lagi dan tidak terkendali. Hal ini tentu tidak ada yang menginginkannya sehingga roda pemulihan ekonomi terhambat dikarenakan inflasi.

Penutup

Inflasi diperkirakan akan meningkat tajam pada beberapa bulan ke depan seiring dengan kenaikan harga pangan dan energi serta pengaruh ekonomi global. Beberapa faktor penyebabnya antara lain: *pertama*, peningkatan *demand* pasca-pulih dari pandemi Covid-19 yang belum dapat dipenuhi dari sisi *supply* akibat faktor produksi di industri dan disrupsi *supply chain*. *Kedua*, peperangan antara Rusia dan

Ukraina telah memberikan dampak terhadap kenaikan harga pangan dan energi dunia. Invasi Rusia ke Ukraina telah menghambat pasokan komoditas ke pasar global sehingga harganya meninggi. Sedangkan kenaikan energi distimulus pengenaan sanksi atas ekspor minyak mentah Rusia yang mengakibatkan pasokan minyak mentah dunia terganggu setiap harinya. *Ketiga*, kebijakan *lockdown* di China akibat pandemi Covid-19 telah memengaruhi konsumsi dan rantai pasok global sehingga turut berperan menaikkan harga komoditas.

Indonesia diperkirakan akan mengalami kenaikan inflasi lebih tinggi dibandingkan Filipina, India, dan Thailand. Perkiraan kenaikan inflasi ini dilihat dari IHK. Menghadapi lonjakan inflasi yang kemungkinan akan terjadi, pemerintah dapat mengambil beberapa kebijakan *exit strategy*, yakni menahan kenaikan harga pangan dan energi melalui *windfall tax* dari ekspor minerba, perkebunan, dan PPN untuk menanggung beban fiskal APBN akibat subsidi yang dikeluarkan. Selain itu, pemerintah agar mendorong peningkatan produksi untuk ketersediaan pasokan pangan dan energi dalam negeri, melakukan konversi energi yang ramah lingkungan, memastikan perluasan insentif harga gas khusus untuk industri prioritas, serta meningkatkan pengawasan atas distribusi komoditas pangan dan energi agar tepat sasaran. Menyikapi permasalahan tersebut, DPR RI melalui komisi terkait perlu melakukan pengawasan terhadap upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk menekan lonjakan inflasi sehingga daya beli masyarakat dan pemulihan roda ekonomi pasca-pandemi Covid-19 dapat terus meningkat.

Referensi

- "Inflasi, Badan Pusat Statistik", 1 April 2022, <https://www.bps.go.id/subject/3/inflasi.html>, diakses 20 April 2022.
- "Menekan Efek Inflasi Energi", *Bisnis Indonesia*, 19 April 2022, hal. 2.
- "Perang Turunkan Prospek Pemulihan", *Media Indonesia*, 16 April 2022, hal. 11.
- "Perlambatan Bayangi Global", *Bisnis Indonesia*, 19 April 2022, hal. 12.
- "Pukulan Ganda Ekonomi Dunia", *Bisnis Indonesia*, 20 April 2022, hal. 12.
- "Saatnya Menuju Ekspansi Ekonomi", *Bisnis Indonesia*, 19 April 2022, hal. 2.
- "Waspada Lonjakan Inflasi", *Media Indonesia*, 20 April 2022, hal. 10.



Nidya Waras Sayekti
nidya.ws@dpr.go.id

Nidya Waras Sayekti, SE., MM., menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Mercu Buana tahun 2006. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Potensi dan Regulasi Fintech di Indonesia" (2018), "Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah di Indonesia" (2019), dan "Permasalahan Ekonomi Nelayan dan Upaya Pemberdayaannya" (2019), "Upaya Pengembangan Logistik Halal di Indonesia" (2020).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.